



Departemen Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sumatera Utara



**PROSIDING SEMINAR NASIONAL
ASOSIASI PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
(APSIPOL) 2018**

**PILKADA SERENTAK, PEMILU, DAN DEMOKRASI DALAM
PERSPEKTIF ILMU POLITIK**

**GEDUNG AULA FISIP USU
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
HARI RABU, 3 OKTOBER 2018
MEDAN, INDONESIA**

Diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Politik FISIP USU

DAFTAR ISI

Pengantar Prosiding.....	v
Daftar Isi	vi
Kapitalisme, Kepemilikan Media dan Agenda Media: Perspektif Ekonomi Politik Media Nurudin Siraj, Farida Nurfalah.....	1
Literasi Politik Kaum Perempuan Penyandang Disabilitas dalam Pemilu 2019: Telaah atas Alat Bantu Sosialisasi Pemilu untuk Penyandang Tunanetra Ana Sabhana Azmy, Pia Khoirotun Nisa	8
Ancaman Diskriminasi Minoritas dan Hilangnya Multikulturalisme di Indonesia: Studi Kasus Penutupan GKI Yasmin Bogor Budi Chrismanto Sirait.....	22
Politik Hukum dan Orbit Badan Peradilan Khusus dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Ali Rido.....	29
Penguatan Perilaku Anti Korupsi di Lingkungan Birokrasi Pemerintah Provinsi Riau Adlin, Tito Handoko	39
Pelebagaan Sistem Kepartaian dan Dampaknya pada Konsolidasi Demokrasi di Indonesia Asrinaldi A	47
Analisis Kebijakan Pemerintah Joko Widodo Terhadap Hak Warga Negara Eks Timor Leste Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2016 Jeanie Annissa, Arin Fithriana	60
Modal Sosial Jeje-Adang dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2015 Ratnia Solihah, Arry Bainus, Mudyati Rahmatunnisa	70
Civil Society, Negara dan Demokrasi: Sebuah Tinjauan Teoritis Indah Adi Putri	82
Peran Pimpinan Pusat Partai Politik dalam Seleksi Kandidat Kepala Daerah pada Pilkada Serentak di Indonesia Siti Witianti, Hendra	86
Ormas dalam Pusaran Politik: Studi Relasi Ormas dan Parpol di Bali Muhammad Ali Azhar.....	99
Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kalimantan Selatan Budi Suryadi, Syahrida, Bachruddin Ali Ahmad, Husein Abdurahman	107

Civil Society, Negara dan Demokrasi: Sebuah Tinjauan Teoritis

*Indah Adi Putri*¹

¹Jurusan Ilmu Politik, FISIP, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Abstrak. Civil society adalah wadah bagi keberlangsungan sebuah proses demokrasi. Sifatnya yang independent, tumbuh atas kehendak sendiri dari masyarakat, maka ia memiliki keleluasaan untuk mensosialisasikan segala ide, gagasan dan wacana-wacana baru yang berhubungan dengan demokrasi. Tocqueville dan Larry Diamond telah mengemukakan pemikirannya tentang civil society. Jika dihadapkan dengan demokrasi di Indonesia, maka konsep dari kedua ahli tersebut bisa digunakan dalam analisis. Civil society diperlukan sebagai wadah dalam membangun *collective mind, collective consciousness* bagi setiap warga negara untuk kepentingan.

Kata kunci: Civil society, collective mind, collective consciousness.

1. Pendahuluan

Masyarakat sipil adalah sebuah entitas yang menjadi bagian dalam perkembangan demokrasi. Keberadaannya selalu ada sebagaimana sebuah demokrasi berjalan dan negara berada. Terminologi terhadap kata ini berbeda-beda, namun melihat ciri-ciri yang dikemukakan oleh para ahli, pada dasarnya *civil society* adalah asosiasi-asosiasi yang dibentuk atas dasar keinginan sendiri dari individu-individu yang ada dalam masyarakat untuk memperbincangkan gagasan, ide dan harapan-harapan mereka sebagai bagian dari sebuah negara.

Ahmad Suhelmi dalam tulisannya mengatakan, sebagai teori maupun realitas sosial politik, *civil society* telah ada sejak lahirnya konsep tentang negara (*state*) di zaman Yunani klasik. Dimasa itu, *civil society* berada pada posisi *integrated* dengan negara (*state-polis*). Keduanya tidak dibedakan secara tegas atau bisa saling bertukar (*interchangeable*)².

Adapun demokrasi yang merupakan aspek penting dalam keberadaan sebuah negara, juga mengalami fase-fase yang tak jauh berbeda dengan *civil society*. Ia bisa dilacak mulai dari zaman Yunani kuno sampai berhasil menguasai sebagian besar system politik dan pemerintahan negara-negara yang ada didunia pada abad ke 20 ini³.

Negara mempunyai fungsi yang sangat beragam mulai dari yang baik hingga buruk. Kekuasaan untuk memaksa yang memungkinkan mereka melindungi hak pribadi dan menciptakan keamanan publik, juga memungkinkan mereka mengambil alih hak milik pribadi dan melanggar hak-hak warga negara mereka⁴.

Max Weber (1946)⁵ mendefinisikan negara sebagai sebuah komunitas manusia yang berhasil mengklaim monopoli penggunaan yang sah atas kekuatan fisik dalam sebuah teritori tertentu. Selanjutnya Fukuyama membedakan antara lingkup aktivitas negara dengan kekuatan negara. Lingkup aktivitas negara mengacu pada berbagai fungsi dan tujuan berbeda yang dijalankan pemerintah, kekuatan adalah kekuasaan atau kemampuan negara merencanakan dan menjalankan berbagai kebijakan dan memberlakukan undang-undang secara bersih dan transparan/kemampuan institusional.

¹ Corresponding author: indahputri1981@yahoo.com

² Ahmad Suhelmi, *Evolusi Historis dan Kembalinya Civil Society ke dalam Wacana Pemikiran Barat Kontemporer*, Telaah Utama Islamia, Vol.III No. 2 hal.54.

³ Bahkan dalam disertasinya Francis Fukuyama telah meramalkan kemenangan demokrasi liberal dan kapitalisme dari ideology lain. Fukuyama, Francis, *Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal, The End of History and The Last Man* (terj), Yogyakarta : Qalam, 2001.

⁴ Francis Fukuyama, *Memperkuat Negara*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2005. hal.1-2.

⁵ Sebagaimana dikutip oleh Francis Fukuyama, *ibid.* hal.8.

Makalah ini akan menghadirkan tinjauan *civil society* yang independen, plural dan mandiri dari intervensi negara dan kaitannya dengan demokrasi, berdasarkan uraian Alexis de Tocqueville. Namun demikian, tetap saja ada pertanyaan yang mendasarinya, untuk apa *civil society* dalam demokrasi? Bagaimana hubungannya dengan negara? Serta apakah *civil society* di Indonesia menjadi indikator bagi keberhasilan demokrasi di Indonesia.

2. Teori Civil Society, Negara dan Demokrasi

Dalam tulisannya *Democracy in America*⁶, Tocqueville mengatakan bahwa asosiasi masyarakat sipil dibentuk berdasarkan hukum, atas inisiatif sendiri yang keberadaannya melintasi kota, negara bagian bahkan negara. Pada beberapa kasus, orang-orang saling berbagi pengetahuan mereka, kemudian berkembang menjadi kelompok-kelompok kecil dan pada akhirnya mereka merupakan bagian dari sebuah bangsa, ibarat bangsa dengan negara, atau ibarat negara dengan pemerintahan.

Sebab di Amerika, hak untuk berkumpul dapat digunakan oleh warganegara dengan berbagai cara. Kebebasan adalah landasan berpijak yang memungkinkan bagi beragam latar belakang perkumpulan/asosiasi untuk eksis....*in America there is no limit to freedom of association for political ends....* Mulai dari yang berlatar pendidikan/pengetahuan, perkumpulan agama, kesehatan, ekonomi dan perdagangan. Asosiasi adalah tempat berkumpul bagi orang-orang untuk mengaplikasikan alasan dan keinginan-keinginan dengan tujuan membawa kesuksesan kepada usaha yang mereka miliki⁷.

Kelompok/asosiasi sipil yang terbentuk dapat menghindari terjadinya tirani mayoritas terhadap minoritas⁸....*In America the citizens who form the minority associate in first place to show their numbers and lessen the moral authority of the majority, and secondly, by stimulating competition, to discover the arguments most likely to make an impression on the majority, for they always hope to draw the majority over to their side and then to exercise power in its name....* Dalam pengertian ini, saya pahami bahwa betapa asosiasi-asosiasi sipil yang terbentuk sangat tergantung kepada individu-individu yang ada di dalamnya, yang harus memiliki kesadaran tinggi untuk selalu mandiri, memiliki kompetensi khusus yang membuatnya mampu berkompetisi dengan kelompok-kelompok lain, untuk mempertahankan keberadaannya. Terlebih bila individu tadi adalah bagian dari kelompok minoritas dalam suatu negara.

Menarik apa yang dikemukakan Tocqueville mengenai adanya hubungan antara publikasi melalui media cetak dengan keberlangsungan sebuah *civil society*. Menurutnya, dengan kondisi individu yang tersebar diberbagai kota, kesibukan dan perbedaan kondisi negara, maka media cetak (dalam hal ini bisa bulletin oleh asosiasi yang bersangkutan), akan dapat terus menyebarluaskan informasi perkembangan dari asosiasi itu, walaupun individu yang tergabung didalamnya tidak bertemu. Mereka dapat terus memantau perkembangan ide-ide, gagasan dari anggota kelompoknya tanpa harus meninggalkan kesibukan pribadinya. Media cetak/bulletin organisasi akan memudahkan kelompok itu sendiri....*a newspaper is an adviser that need not be sought out, but comes of its own accord and talks to you briefly every day about commonweal without distracting you from private affairs...then a newspaper gives publicity to the feeling or idea that had occurred to them all simultaneously, loog seeking each other in the dark, at last meet and unite.*

Tocqueville memberikan pandangannya bahwa *civil society* yang demokratis perlu menghindari apa yang dinamakannya *state despotism*, sebuah despotisme negara dengan kecenderungan sentralisme yang kuat. Despotisme ini merusak kebebasan masyarakat dan membuat negara berada dalam posisi mengatur, pendidik, penasihat dan penghukum kehidupan sosial. Untuk menghindari terbentuknya sebuah *state despotism* itu menurut Tocqueville perlu dilakukan

⁶ Tocqueville, 'Democracy in America', bagian dari buku Hodgkinson, Virginia A and Foley, Michael W (ed), *The Civil Society Reader*, Tufts University, Published by University Press of New England Hannover and London. Hal. 113- 132.

⁷ *Ibid.* Hal. 115.

⁸ *Ibid.* Hal. 117.

revolusi demokrasi yang berorientasi pada pembatasan intervensi negara, menghindari penyelewengan kekuasaan negara dan mencegahnya untuk tidak melakukan perampokan terhadap hak-hak kebebasan warganegara. Tetapi Tocqueville juga mengingatkan agar kekuasaan negara jangan terlalu lemah berhadapan dengan civil society. Tidak mereduksi kekuasaan negara hingga pada tingkat paling minimum. Menurutnya, lembaga-lembaga politik yang kuat dan aktif tetap diperlukan untuk menciptakan kondisi-kondisi yang menyuburkan kebebasan demokratis (*democratic freedom*) dan kesamaan (*equality*)⁹.

Dari pandangan ini bisa dilukiskan tentang negara disatu sisi, memiliki tugas dan kewenangan, sementara di dalamnya ada masyarakat sipil yang memiliki hak dan peran besar juga, tetapi mereka tidak saling berhadapan. Mereka saling mendukung demi terwujudnya demokrasi dan saling mengisi dalam upaya menciptakan kesejahteraan bagi warga negara.

Menurut saya, Tocqueville mengharapkan adanya keseimbangan antara negara dan civil society. Maksud saya bila ada negara kemudian masyarakat, maka civil society berada antara keduanya. Ia bisa bergerak keatas (negara) atau bisa juga lebih cenderung ke bawah (masyarakat). Bila ia cenderung berat ke bawah, maka artinya peran yang dimainkannya adalah pemberdayaan/*empowerment*, tetapi bila ia bergerak ke atas berarti peran yang dimainkannya adalah pengawasan/kontrol terhadap kekuasaan negara. Bila ia melakukan keduanya, maka lembaga-lembaga negara adalah fasilitator untuk keberadaan civil society.

Selanjutnya Larry Diamond¹⁰ mengatakan bahwa civil society berpengaruh besar terhadap perkembangan demokrasi. Menurutnya, civil society berfungsi sebagai berikut;

1. Membatasi kekuasaan negara dengan mobilisasi yang dilakukannya, pada fungsi ini civil society dapat melakukan pengawasan dengan meminta negara untuk lebih bertanggung jawab pada hukum dan harapan publik.
2. Memperkokoh peran partai politik melalui kegiatan yang dilakukan, mendorong pemahaman terhadap kewajiban-kewajiban di samping hak-hak kewarganegaraan demokrasi
3. Melakukan pendidikan demokrasi
4. Mengartikulasikan, menampung dan mempresentasikan berbagai kepentingan
5. Mengubah praktek clientelisme ke kewarganegaraan pada tingkat lokal
6. Menghasilkan beragam kepentingan yang dapat melintasi pembelaan regional, etnis dll
7. Merekrut dan melatih para pemimpin politik baru
8. Membantu dan mencegah kecurangan proses pemilu
9. Menyebarkan informasi untuk memberdayakan warga dalam pencapaian dan pembelaan kolektif atas berbagai kepentingan dan nilai
10. Memobilisasi informasi dan pemahaman baru bagi pencapaian reformasi ekonomi
11. Mengembangkan resolusi konflik dan aneka teknik mediasi
12. Memperkuat pondasi-pondasi sosial demokrasi
13. Meningkatkan akuntabilitas, responsivitas, inklusivitas, efektivitas demi terciptanya legitimasi pada system politik.

Dari apa yang dikemukakan oleh Tocqueville yang melihat keberadaan civil society harus mandiri dan independen dari intervensi negara, dan peran civil society dalam perkembangan demokrasi yang dikemukakan oleh Diamond, maka kita dapat melihat benang merah dari keduanya. Untuk melakukan peran seperti yang dikatakan Diamond maka asosiasi terlebih dahulu harus kuat dan bebas dari intervensi negara.

Sementara Francis Fukuyama mengatakan bahwa sejarah telah berakhir dengan kemenangan demokrasi liberal dan kapitalis. Selanjutnya yang akan terjadi adalah perjuangan untuk memperoleh pengakuan. Beranjak dari argumentasi Fukuyama¹¹, maka saya mencoba menghubungkannya dengan keberadaan civil society dalam uraian Tocqueville. Dalam lingkup aktivitas negara, dimana negara dilihat sebagai lembaga yang mengatur segala aspek kehidupan

⁹ Ahmad Suhelmi, *Op.cit.* hal. 63.

¹⁰ Diamond, Larry, *Developing Democracy, Toward Consolidation*, Yogyakarta : IRE Press, 2003. hal 298-308.

¹¹ Untuk lebih jelasnya, lihat Fukuyama, *Memperkuat Negara*, hal.9.

ekonomi, menjalankan fungsi-fungsinya mulai dari fungsi minimal sampai fungsi aktivis, maka jelaslah apa yang dikatakan oleh Tocqueville bahwa civil society sebagai seni berasosiasi (yang didasarkan pada keterikatan) memiliki peran yang besar.

3. Penutup

Civil society dan demokrasi adalah dua alat yang menjadi faktor penyeimbang agar negara tetap pada posisi yang memegang asas-asas demokrasi itu sendiri. Jika melihat keberadaan civil society sekarang ini di Indonesia secara keseluruhan, terutama pada lima tahun terakhir, hampir tidak terlihat gerakan yang begitu berarti. Civil society secara umum lebih berproses sebagai gerakan yang memberdayakan masyarakat. Lebih berat ke bawah dari pada ke atas, dan tidak pula di tengah-tengah.

Belakangan malah ada kecenderungan untuk terkooptasinya gerakan masyarakat sipil dalam politik di Indonesia. Gerakan yang mengatas namakan tagar #2019gantiPresiden misalnya, diminta untuk dihentikan. Demikian juga gerakan tagar #2019tetapJokowi. Hal ini memperlihatkan adanya kecenderungan pembatasan gerak masyarakat sipil dalam kehidupan politik.

Tentu hal ini bukanlah hal yang sehat untuk kehidupan demokrasi, yang memberikan keleluasaan untuk masyarakat dalam mengemukakan pendapat dan pikiran. Harapannya sebagai bentuk *collective mind*, gerakan berupa tagar ini diberikan keleluasaan untuk mengungkapkan kritik terhadap kebijakan pemerintahan ataupun dukungan. Sehingga kesan bahwa pemerintah melakukan kooptasi terhadap civil society dapat berkurang. Bukankah kita sudah mengakui bahwa demokrasi adalah proses terbaik dalam kehidupan politik. maka sudah seyogyanyalah civil society diberikan tempat bagi terbukanya pemikiran tentang bagaimana kehidupan politik yang lebih baik dan kehidupan Indonesia yang lebih berkejahteraan.

Daftar Pustaka

- Suhelmi, Ahmad. *Evolusi Historis dan Kembalinya Civil Society ke dalam Wacana Pemikiran Barat Kontemporer*, Telaah Utama Islamia, Vol.III No. 2.
- Fukuyama, Francis. 2001. *Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal, The End of History and The Last Man* (terj), Yogyakarta: Qalam.
- Francis Fukuyama. 2005. *Memperkuat Negara*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hodgkinson, Virginia A and Foley, Michael W (ed). *The Civil Society Reader*, Tufts University, Published by University Press of New England Hannover and London.
- Diamond, Larry. 2003. *Developing Democracy. Toward Consolidation*, Yogyakarta: IRE Press.